

ABSTRAKSI

Perusahaan adalah pengusaha kena pajak yang bergerak di bidang jasa kontraktor atau jasa pemborong bangunan, yang mengerjakan berbagai proyek antara lain proyek pembangunan gedung-gedung, rumah tinggal, jembatan dan lain-lain.

Sebagai pengusaha kena pajak, perusahaan mempunyai kewajiban perpajakan yang berhubungan dengan pajak pertambahan nilai (PPN), yaitu PPN atas kegiatan penyerahan jasa yang dilakukan kepada pihak pemberi kerja dan PPN atas pembelian barang kena pajak yang digunakan dalam penyelesaian suatu proyek.

Selama ini, perusahaan selalu melaporkan SPT Masa PPN-nya secara periodik ke KPP. Dari laporan SPT Masa PPN tersebut ternyata PPN yang dilaporkannya selama ini hanya atas transaksi penyerahan jasa kena pajak yang merupakan pajak keluaran bagi perusahaan. Sedangkan atas transaksi yang berhubungan dengan pembelian material untuk penyelesaian proyek yang merupakan barang kena pajak/ **BKP** (yang dalam hal ini merupakan pajak masukan bagi perusahaan) tidak nampak pada SPT Masa PPN. Hal ini menyebabkan perusahaan tidak dapat mengkreditkan pajak masukan untuk mendapatkan kompensasi atau restitusi pajak.

Dari kejadian tersebut kemudian dilakukan penelitian lebih lanjut dalam mencari penyebabnya, yang akhirnya menemukan permasalahan yang dihadapi perusahaan dan memberikan saran sebagai jalan keluar yang sebaiknya dilakukan perusahaan untuk memecahkan masalah tersebut.

Dari hasil penelitian ternyata penyebab dari tidak adanya pengkreditan atas pajak masukan tersebut adalah perusahaan selama ini dalam melakukan transaksi pembelian material yang merupakan **BKP** tidak menerima faktur pajak standar, meskipun perusahaan membeli BKP tersebut dari supplier yang merupakan PKP. Sehingga perusahaan kehilangan haknya untuk mengkreditkan pajak masukannya, karena tidak adanya faktur pajak.

Oleh karena perusahaan tidak dapat mengkreditkan pajak masukannya, maka perusahaan memperlakukan PPN tersebut sebagai bagian dari harga perolehan barang, di mana hal ini menyebabkan biaya menjadi lebih besar. Selain itu perusahaan dalam menyajikan pendapatan pada laporan laba rugi tetap memasukkan unsur PPN, sehingga pendapatan disajikan terlalu besar.

DAFTAR ISI

JUDUL SKRIPSI	i
PENGESAHAN	ii
ABSTRAKSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
 BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Problematika	2
1.3. Batasan Penelitian	3
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
1.4.1. Tujuan Penelitian	4
1.4.2. Manfaat Penelitian	4
1.5. Sistematika Skripsi	5
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Landasan Teori	7
2.1.1. Pengertian Akuntansi	7
2.1.2. Pengertian Laporan Keuangan	8
2.1.3. Pendapatan	9
2.1.3.1. Pengakuan Pendapatan untuk Perusahaan Kontraktor	10
2.1.4. Karakteristik Perusahaan Kontraktor	13
2.1.4.1. Pendapatan Kontrak	14
2.1.4.2. Biaya Kontrak	14
2.1.5. Pengertian Pajak	15
2.1.5.1. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak	17
2.1.5.2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Pemberitahuan (SPT)	18

2.1.6.	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	20
2.1.6.1.	Obyek Pajak	21
2.1.6.2.	Subyek PPN	23
2.1.6.3.	Dasar Pengenaan Pajak	24
2.1.6.4.	Saat Pajak Terutang	25
2.1.6.5.	Faktur Pajak	26
2.1.6.6.	Pengkreditan Pajak Masukan	28
2.1.7.	Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai	29
2.1.7.1.	Prosedur Pencatatan Pembelian Atas Barang Yang Ada PPN-nya	30
2.1.7.2.	Prosedur Pencatatan Penjualan dan PPN Terutang	31
2.1.7.3.	Saat Perhitungan Pembayaran dan Pembuatan Laporan	32
BAB III METODE PENELITIAN		
3.1.	Sifat dan Karakteristik Penelitian	33
3.2.	Jenis dan Sumber Data	33
3.2.1.	Jenis Data	33
3.2.2.	Sumber Data	33
3.3.	Instrumen dan Metode Pengumpulan Data	34
3.3.1.	Instrumen Pengumpulan Data	34
3.3.2.	Metode Pengumpulan Data	34
3.4.	Teknik Analisis Data	35
BAB IV PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN		
4.1.	Gambaran Umum Perusahaan	36
4.1.1.	Sejarah Perusahaan	36
4.1.2.	Struktur Organisasi Perusahaan	36
4.1.3.	Kegiatan Operasi Perusahaan	38
4.1.4.	Proses Pencatatan Data Akuntansi Perusahaan	39

4.2.	Deskripsi Hasil Penelitian	41
4.2.1.	Pencatatan PPN Sebagai Akibat Pembelian Bahan dan Penerimaan Termin-termin pada Perusahaan	41
4.3.	Pembahasan	48
4.3.1.	Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai	48
4.3.2.	Penyajian Pajak Pertambahan Nilai pada Laporan Keuangan Perusahaan	57
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		
5.1.	Kesimpulan	60
5.2.	Saran	61
 LAMPIRAN I		
LAMPIRAN II		64
 DAFTAR PUSTAKA		65